HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: JUMAT
06 NOVEMBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

Baru Rampung, Talud Rp264 Juta di Lahumoko - Buton Utara Retak dan Pecah, Warga Pertanyakan Kualitas, APH Diminta Bertindak



FAKTA-FAKTA PENTING:

- **Lokasi:** Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara.
- **Jenis proyek:** Pembangunan dinding penahan tanah (talud).
- **Nilai kontrak:** Rp264.297.000 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- **Nomor kontrak:** 14/Kontrak/PPK-Trans/Butur/VIII/2026.
- **Tanggal kontrak:** 13 Agustus 2026.
- **Masa pelaksanaan:** 60 hari kalender.
- **Tahun anggaran:** 2026.
- **Kondisi:** Sejumlah bagian talud sudah retak, pecah, dan terkelupas meski belum lama selesai dikerjakan.
- **Desakan warga:** Masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan.
- **Tanggapan dinas:** Kepala Dinas Transmigrasi Buton Utara menyebut telah menghubungi penyedia jasa untuk segera melakukan perbaikan sesuai standar.

Laporan: KASRUN, Baubau Post-Durasi Times

BUTON UTARA, BP-Proyek pembangunan talud senilai Rp264.297.000 di Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan setelah sejumlah bagian bangunan mengalami keretakan, pecah, dan terkelupas meski belum lama selesai dikerjakan. Kerusakan tersebut memicu desakan warga agar Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki kualitas pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran negara itu.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, Selasa (3/11/2026), kerusakan terlihat pada bagian atas talud. Sejumlah beton tampak retak dan pecah, bahkan sebagian materialnya terkelupas. Beberapa bagian konstruksi terlihat tidak lagi utuh, sementara material batu berukuran besar menumpuk di sepanjang sisi bangunan.

Warga mempertanyakan mutu pekerjaan proyek tersebut. Mereka menilai kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat perlu mendapat perhatian serius karena infrastruktur publik semestinya memiliki kekuatan dan daya tahan sesuai perencanaan teknis. Masyarakat juga menduga pekerjaan tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap konstruksi.

"Harapan kami pihak APH segera melakukan penyelidikan," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan saat diwawancarai wartawan.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara, La Madia, mengatakan telah menghubungi pihak penyedia jasa untuk segera memperbaiki bagian talud yang mengalami keretakan dan pecah. Ia menyebut pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban penyedia agar pekerjaan diperbaiki sesuai standar teknis.

"Kami sudah menghubungi penyedia dan meminta agar segera dilakukan perbaikan. Pekerjaan ini harus sesuai spesifikasi," kata La Madia.

Ia menambahkan, pihak penyedia jasa juga diminta untuk memasang papan informasi proyek yang sebelumnya tidak ditemukan di lokasi. Papan tersebut penting sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat terkait nilai kontrak, waktu pelaksanaan, dan pihak pelaksana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari penyedia jasa terkait rencana perbaikan yang dimaksud.

Lanjut ke Hal: 7

SMPN 1 Lapandewa Perkuat Kompetensi Guru Cegah Perundungan dan Kekerasan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-SMP Negeri 1 Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, memperkuat perlindungan peserta didik melalui peningkatan kompetensi guru dalam mencegah dan menangani perundungan, kekerasan fisik, verbal, sosial, hingga kekerasan seksual. Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop yang digelar di lingkungan sekolah, Selasa (3/11/2026), sebagai bagian dari komitmen membangun pendidikan yang aman dan ramah anak.

Lanjut ke Hal: 7

ASR Pacu Sekolah Unggulan di Kendari, Empat Kelas Disiapkan pada 2027



Laporan: Prasetyo M

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai memperkuat pengembangan sekolah unggulan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas pendidikan. Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menargetkan SMAN 1 dan SMAN 4 Kendari masing-masing memiliki empat kelas unggulan pada 2027.

Target tersebut disampaikan ASR saat meninjau tiga sekolah menengah atas di Kota Kendari, Selasa (3/11/2026). Selain mengevaluasi pengembangan kelas unggulan di SMAN 1

Lanjut ke Hal: 7

Kadis Dikpora Baubau La Mane Sebut Kualitas Udara Membaik, Siswa PAUD hingga SMP di Baubau Kembali PTM



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau kembali membuka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP setelah kondisi kualitas udara dinilai membaik. Meski aktivitas pendidikan kembali berlangsung di sekolah, ancaman dampak kabut asap belum sepenuhnya diabaikan sehingga satuan pendidikan diminta tetap menerapkan protokol perlindungan kesehatan bagi peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Baubau, La Mane, mengatakan Dinas Pendidikan terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekaligus memastikan langkah kesiapsiagaan terhadap dampak kabut asap berjalan di lingkungan sekolah. Koordinasi lintas instansi juga disiapkan untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak selama kegiatan belajar berlangsung.

Kebijakan pengaktifan kembali PTM tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Baubau Nomor 26/SE/HK/2026 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kembali Pembelajaran Tatap Muka Sehubungan dengan Membaiknya Kualitas Udara di Kota Baubau. Dengan kebijakan itu, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan secara jarak jauh kembali berlangsung langsung di masing-masing satuan pendidikan.

Pembukaan kembali sekolah tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi lingkungan. Pemerintah meminta peserta didik membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sementara aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi untuk mengu-

Lanjut ke Hal: 7

Porprov 2026 di Kendari, PGSI Baubau Siapkan 18 Atlet Gulat Andalan Daerah



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Baubau menyiapkan 18 atlet putra dan putri untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) XV yang dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada Desember 2026. Selain membidik prestasi, persiapan tersebut menjadi upaya mempertahankan tradisi perolehan medali sekaligus meningkatkan daya saing atlet gulat Bau-

Lanjut ke Hal: 7

PDIP Sebut Penyadapan Presiden Prabowo sebagai Makar, Yusril Beri Penjelasan



Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo merupakan perbuatan makar.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret tiga personel Polri menjadi tersangka memunculkan perhatian terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat negara. PDI Perjuangan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk makar, sementara pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perkara yang sedang diproses belum mengarah pada tindak pidana makar.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan, dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik yang melibatkan tiga personel kepolisian merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.

Ketiga personel tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Asep menyampaikan penegasan tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," kata Asep.

Di tengah proses hukum tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal. Namun, dia mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada tiga tersangka, melainkan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan praktik serupa yang pernah digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.

Hasto menilai penyadapan tanpa dasar hukum, terlebih jika disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta sistem hukum nasional. Menurutnya, tindakan yang menyasar kepala negara tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai penyalahgunaan kewenangan.

"Terlebih penyadapan ditujukan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Maka ini merupakan tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi," tegas Hasto di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dia juga memberikan apresiasi kepada anggota internal Polri yang berani melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Hasto menilai keberanian itu mencerminkan integritas moral yang perlu dipertahankan dalam institusi penegak hukum. Dia berharap pengungkapan kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyasar jurnalis, kelompok kritis, tokoh politik, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perkara tersebut sejauh ini tidak menunjukkan indikasi tindak pidana makar. Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka, penyidikan berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa malam.

Yusril menjelaskan, KUHP mengatur makar dalam tiga kategori utama, yakni makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara. Namun, berdasarkan perkembangan penanganan perkara, belum terdapat indikasi yang mengarah pada ketiga kategori tersebut.

Secara historis, persoalan penyadapan dan perlindungan privasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia, reformasi 1998 mendorong penguatan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang kemudian antara lain tercermin dalam Pasal 28G UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Secara internasional, pengakuan terhadap hak privasi telah tercantum dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 yang melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi seseorang.

Dalam konteks Indonesia, penyadapan memang dikenal sebagai salah satu instrumen penegakan hukum untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan. Polri sendiri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri dengan memperhatikan prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Asep memastikan proses penegakan hukum oleh Bareskrim serta pemeriksaan etik oleh Divisi Propam Polri akan terus diawasi.

PDIP berharap pengusutan perkara tersebut menjadi momentum pembenahan internal kepolisian sekaligus pemulihan kepercayaan publik. Hasto menegaskan bahwa kewenangan aparat yang dapat menggunakan upaya paksa atas nama negara harus dijalankan berdasarkan moral, etika, dan integritas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis. Penanganan perkara ini diharapkan memperkuat supremasi hukum serta memastikan kepolisian menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi.(*)

TB Hasanuddin Dorong Prabowo Cabut Bintang Mahaputera Mantan Kapolri Listyo



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP_ Dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan desakan agar pemerintah mengevaluasi tanda kehormatan negara yang pernah diterimanya. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Presiden mempertimbangkan pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Desakan tersebut disampaikan Hasanuddin di Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, tanda kehormatan negara tidak semata-mata menjadi pengakuan atas jasa seseorang, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga integritas moral, keteladanan, dan komitmen terhadap bangsa.

"Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan," kata Hasanuddin.

Listyo menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, saat masih menjabat sebagai Kapolri. Penghargaan tersebut merupakan salah satu tanda kehormatan sipil tertinggi di Indonesia, berada satu tingkat di bawah Bintang Republik Indonesia. Bintang Mahaputera terdiri atas lima tingkatan, dengan Adipurna sebagai kelas tertinggi.

Hasanuddin meminta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menelaah persoalan tersebut secara objektif. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagai dasar hukum untuk menilai kelayakan penerima penghargaan negara.

Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mencabut tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu dalam Pasal 25, khususnya terkait integritas moral dan keteladanan, kesetiaan kepada negara, serta ketentuan mengenai putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 36 mengatur bahwa usulan pencabutan harus disertai alasan dan bukti, kemudian diteliti serta diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan mempertimbangkan keterangan penerima.

Secara historis, Bintang Mahaputera telah diatur sejak Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 yang ditetapkan pada 26 Juni 1959. Tanda kehormatan tersebut dibentuk untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara di luar bidang militer. Pengaturan itu kemudian mengalami perubahan sebelum sistem penghargaan negara ditata kembali melalui UU Nomor 20 Tahun 2009.

Persoalan penyadapan oleh aparat negara juga memiliki catatan panjang dalam sejarah internasional. Skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972, yang berkaitan dengan pembobolan kantor Partai Demokrat dan penyalahgunaan kekuasaan, menjadi salah satu peristiwa penting yang mendorong penguatan perlindungan privasi warga. Kongres Amerika Serikat kemudian mengesahkan Privacy Act 1974 untuk membatasi penyalahgunaan pengumpulan dan pengelolaan informasi pribadi oleh lembaga pemerintah.

Dalam perkara di Indonesia tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Listyo, mereka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025â€“2026. Ketiga tersangka diduga memerintahkan pemasangan sejumlah nomor telepon ke perangkat penyadapan milik Polri tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo.

"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan, atau adanya proses penegakan hukum," kata Asep.

Selain Presiden, sejumlah pihak lain disebut menjadi korban penyadapan, antara lain tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, politikus, hingga media massa. Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Hasanuddin berharap pemerintah tidak mengabaikan aspek integritas dalam pemberian tanda kehormatan negara. Ia menilai proses evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil memiliki landasan hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam menjaga kehormatan institusi negara.(*)

Gubernur ASR Ajak Golkar Bersinergi, Empat Sektor Jadi Prioritas Pembangunan Sultra



Laporan: Mashuri

KOLAKA, BP- Pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik. Karena itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengajak Partai Golkar memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan ASR dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Sultra di Alun-alun 19 November, Kabupaten Kolaka, Minggu (1/11/2026). Kegiatan itu dihadiri ribuan kader Golkar dari 17 kabupaten/kota.

Menurut ASR, perbedaan pilihan politik dan latar belakang organisasi tidak boleh menghambat kerja sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah.

"Sinergi bukan berarti seluruh pihak harus memiliki pandangan yang sama. Namun, bagaimana kita bersedia saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan dengan tetap berlandaskan aturan hukum serta menghormati setiap perbedaan," kata ASR.

Dalam konteks pembangunan Sultra, pemerintah provinsi telah menetapkan empat sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agro-maritim. Keempat sektor tersebut diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.

ASR juga menegaskan pentingnya peran partai politik dalam kehidupan demokrasi. Selain menyalurkan aspirasi masyarakat, partai politik memiliki tanggung jawab mengembangkan pendidikan politik, melahirkan kebijakan publik, serta mendorong program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif. Hal itu penting agar pembangunan berjalan lebih baik, dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai," ujarnya.

Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan pemimpin maupun partai politik tidak semata-mata diukur dari kemenangan dalam kontestasi politik. Ukuran lainnya adalah kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelantikan tersebut. Menurut ASR, kegiatan itu bukan sekadar pergantian atau pengisian struktur organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen, mengembangkan amanah, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap pengurus periode 2025-2030 mampu menjalankan tanggung jawab organisasi serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara historis, peran partai politik dalam pembangunan Indonesia memiliki landasan panjang sejak masa awal kemerdekaan. Pemilihan umum pertama pada 1955 menjadi tonggak penting perkembangan demokrasi multipartai di Indonesia. Dalam perkembangannya, reformasi politik 1998 juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi. Dalam konteks global, demokrasi perwakilan di berbagai negara menempatkan partai politik sebagai salah satu penghubung antara aspirasi warga dan proses pengambilan kebijakan. Karena itu, kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, sejumlah kepala daerah, serta ribuan kader Partai Golkar dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.(*)

Bunda Literasi Sultra Dorong Keluarga Bentengi Anak dari Hoaks Digital



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Kemampuan menyaring informasi di tengah derasnya arus digital perlu dibangun sejak lingkungan keluarga. Bunda Literasi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, mengajak orang tua membiasakan anak membaca sekaligus mendampingi mereka memeriksa kebenaran informasi untuk mencegah paparan hoaks.

Pesan tersebut disampaikan Arinta saat membuka Festival Literasi Sultra 2026 di Kendari, Selasa (3/11/2026). Menurut dia, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi kemampuan masyarakat memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Arinta menilai, keluarga memiliki posisi strategis dalam membentuk kebiasaan literasi anak. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua ialah menyediakan waktu 10 hingga 14 menit setiap hari untuk membaca bersama, kemudian mendiskusikan isi bacaan agar anak terbiasa memahami pesan dan mengembangkan pemikiran kritis.

"Literasi adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Arinta.

Ia juga mengingatkan bahwa pendampingan anak tidak boleh berhenti pada aktivitas membaca buku. Orang tua perlu mengetahui teknologi dan perangkat digital yang digunakan anak, sekaligus membimbing mereka membedakan informasi yang benar, keliru, maupun menyesatkan. Dengan demikian, kemudahan mengakses informasi tidak membuat anak menjadi sasaran penyebaran disinformasi.

Ajakan tersebut sejalan dengan tantangan literasi nasional. Sejak 2003, Indonesia mengikuti Program for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penilaian ini mengukur kemampuan peserta didik, termasuk dalam memahami dan mengevaluasi bacaan. Hasil PISA 2022 menunjukkan skor membaca Indonesia sebesar 359, masih di bawah rata-rata OECD sebesar 476. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan kemampuan membaca dan berpikir kritis sejak dini.

Secara internasional, perhatian terhadap literasi juga telah berkembang dari kemampuan membaca dan menulis menuju kecakapan memahami informasi media dan teknologi. UNESCO melalui program literasi media dan informasi (Media and Information Literacy) mendorong masyarakat agar mampu mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan memproduksi informasi secara kritis. Pendekatan ini semakin relevan di tengah penyebaran informasi palsu melalui berbagai platform digital.

Festival Literasi Sultra 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas gerakan tersebut. Mengusung tema â€œLiterasi Kuat, Sultra Berkarya, Sejahtera Bersamaâ€ , kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sultra itu berlangsung pada 3-5 November 2026.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sultra, Usnia, mengatakan festival tersebut menargetkan sekitar 400 peserta. Mereka berasal dari kalangan pelajar, penulis, pegiat literasi, akademisi, hingga masyarakat umum yang akan mengikuti berbagai agenda selama tiga hari.

Rangkaian kegiatan meliputi gelar wicara, bedah buku, pameran, serta sejumlah perlombaan untuk peserta jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK/MA. Kompetisi yang diselenggarakan mencakup lomba mewarnai, ranking satu, menulis dan membaca puisi, serta bertutur.

Selain itu, panitia menyiapkan dua sesi bedah buku yang mengangkat karya sastra daerah dan buku Janda Itu Ibuku karya Maman Suherman. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan antara penulis, pembaca, dan masyarakat untuk memperluas wawasan serta meningkatkan apresiasi terhadap karya literasi.

Pameran festival juga menghadirkan buku, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hasil karya masyarakat penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Produk tersebut berasal dari Kabupaten Buton, Kolaka Utara, Muna, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Program ini memperlihatkan fungsi perpustakaan tidak sebatas tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kegiatan produktif masyarakat.(*)

Hadiri Puncak HUT Lakambau ke-20, Hugua Minta Tradisi Adat Jadi Identitas dan Kekuatan Ekonomi



Laporan:Firman

BUTON SELATAN, BP- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mendorong masyarakat Buton Selatan mengembangkan warisan sejarah dan budaya leluhur menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut dia, kekayaan sejarah yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan Buton dan sekitarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui ekonomi budaya, pariwisata sejarah, serta pelestarian tradisi lokal.

Pesan tersebut disampaikan Hugua saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Kelurahan Lakambau, Kabupaten Buton Selatan. Peringatan yang berlangsung selama tujuh hari sejak 24 Oktober 2026 itu menjadi momentum memperkuat identitas masyarakat, merawat tradisi leluhur, sekaligus membangun solidaritas sosial.

Hugua mengatakan, hubungan sejarah dan kekerabatan masyarakat di Sulawesi Tenggara tidak dapat dipandang secara terpisah. Jejak kebudayaan masyarakat Buton memiliki keterkaitan dengan sejumlah wilayah, termasuk Wakatobi, Bonerate, dan Liwu. Keterhubungan tersebut merupakan kekayaan sejarah yang perlu ditelusuri dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya.

"Bukan hanya Buton Selatan saja yang ada di Lippo, ada juga Wakatobi, ada Bonerate, ada Liwu. Kita tidak boleh terlalu banyak hanya bicara sejarah Majapahit tanpa menghubungkannya dengan kesejahteraan nyata," ujar Hugua.

Ia menegaskan, sejarah tidak seharusnya hanya menjadi bahan pembicaraan dalam kegiatan seremonial. Warisan leluhur harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan potensi budaya, menurut dia, dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat ekonomi daerah.

"Sejarah ini harus mampu menjadi duit, menjadi kekuatan ekonomi, membawa kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat kita," tegasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman sejumlah negara yang mengembangkan warisan sejarah sebagai bagian dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif. UNESCO, melalui Konvensi Warisan Dunia 1972, menempatkan perlindungan warisan budaya dan alam sebagai tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Di Indonesia, perhatian terhadap kekayaan budaya juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan tradisi, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan warisan budaya sebagai bagian penting pembangunan nasional.

Dalam konteks Buton Selatan, pengembangan ekonomi budaya dapat dilakukan dengan memperkuat kegiatan adat, memperkenalkan sejarah kerajaan, mengembangkan destinasi wisata sejarah, serta melibatkan generasi muda dalam promosi kebudayaan. Dengan demikian, tradisi tidak hanya dipertahankan sebagai identitas masyarakat, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi.

Rangkaian HUT Lakambau ke-20 diawali dengan kegiatan tapak tilas ke Makam Raja La Maindo, kemudian dilanjutkan dengan ritual adat Tuturani dan sejumlah kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah kepedulian terhadap anak yatim-piatu melalui tradisi memberi makan dan merawat mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang diwariskan leluhur.

Dalam penjelasan tokoh adat, tradisi tersebut mengandung pesan spiritual tentang kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas. Keteladanan Rasulullah SAW yang sejak kecil menjadi yatim-piatu serta kisah keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husein, dan Imam Zainal Abidin, menjadi bagian dari nilai yang diangkat dalam pemaknaan tradisi tersebut.

Puncak peringatan itu turut dihadiri Sultan Buton ke-41, Sekretaris Daerah Buton Selatan yang mewakili Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I, Asisten II, Asisten III, tokoh adat, serta masyarakat. Lurah Lakambau, La Ode Muhammad Insan Al Arif Rihan, menyebut kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga kesinambungan adat di tengah perubahan zaman.

Hugua berharap peringatan HUT Lakambau tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Ia meminta pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda membangun sinergi agar warisan budaya tetap hidup serta dapat dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan. Pada kesempatan itu, ia juga secara resmi membuka rangkaian kegiatan malam yang menampilkan kreativitas para pemuda Lakambau.

"Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara ke depan kita tetap bertemu dan melanjutkan ini, karena inilah identitas kita," katanya.(*)

Rahman Dorong UMKM Butur Jadi Pemasok Utama Kebutuhan Pangan Program MBG



Laporan: Kasrun

BURANGA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta nelayan lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, S.KM., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Sekretariat Daerah Buton Utara, Kamis (29/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Rahman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil langkah konkret untuk menghubungkan potensi produksi pangan daerah dengan kebutuhan operasional SPPG. UMKM lokal diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi pemasok utama bahan baku pangan secara berkelanjutan.

Menurut Rahman, program MBG harus memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan makanan bergizi. Keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai penting agar perputaran ekonomi dari program pemerintah tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Buton Utara.

"Percepatan MBG ini harus kita kawal bersama. Kita ingin memastikan tidak hanya anak-anak kita yang mendapat manfaat gizi, tetapi juga ekonomi lokal kita yang ikut bergerak melalui keterlibatan UMKM, petani, dan peternak," tegas Rahman.

Ia juga meminta instansi terkait memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Para produsen lokal perlu didorong meningkatkan kualitas hasil produksi agar memenuhi standar kebutuhan pangan SPPG.

Penguatan rantai pasok tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rakor Satgas MBG. Peserta rapat melakukan pemetaan potensi pasokan pangan lokal, mengidentifikasi peluang keterlibatan UMKM, serta membahas berbagai kendala yang berpotensi menghambat operasional SPPG, mulai dari ketersediaan bahan baku, distribusi, hingga tata kelola program.

Rapat koordinasi itu sekaligus menjadi forum penyamaan persepsi dan penguatan langkah lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan MBG serta memastikan kesiapan operasional seluruh SPPG yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara.

Sejumlah unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Kasdim 1429 Butur Mayor Inf. Hamka Saad, Wakapolres Buton Utara Kompol Dudy Iswari Rasjid, S.H., Asisten Perekonomian Setda Butur Dr. H. Harmin Hari, S.P., M.Si., serta Kabag Perekonomian Setda Dr. Muh. Rajab Rusman, SKM., M.Kes. Hadir pula pimpinan OPD terkait, koordinator wilayah, dan para koordinator SPPG.

Dari perspektif historis, keterkaitan program pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat bukanlah pendekatan baru. Di Indonesia, kebijakan perbaikan gizi telah berkembang sejak pelaksanaan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) pada dekade 1970-an. Program tersebut menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan status gizi. Sementara itu, secara internasional, program pemberian makanan di sekolah telah lama dikembangkan, termasuk melalui World Food Programme (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sejak 1963 menjalankan dukungan pemberian makanan bagi anak sekolah di berbagai negara.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa program pangan dan gizi dapat memberikan manfaat lebih luas apabila terhubung dengan sistem produksi serta ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, pelibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan dalam rantai pasok MBG di Buton Utara menjadi salah satu aspek strategis untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat ekonomi daerah.(*)

80 Perusahaan dan Delapan Pemda Raih Satya JKN Awards 2026 dari BPJS Kesehatan



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Kepatuhan badan usaha dan pemerintah daerah menjadi salah satu penentu keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mendorong tanggung jawab tersebut, BPJS Kesehatan menganugerahkan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan delapan pemerintah daerah yang dinilai konsisten mendukung perlindungan kesehatan pekerja dan keluarganya. Penghargaan tersebut diserahkan pada 30 Oktober 2026 di Jakarta.

Dari sisi kepesertaan, tantangan JKN saat ini bukan semata memperluas jumlah masyarakat yang terdaftar, melainkan memastikan peserta tetap aktif dan memperoleh perlindungan secara berkesinambungan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 jumlah peserta JKN mencapai 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 79,49 persen.

Menurut Prihati, perusahaan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kesinambungan perlindungan tersebut. Kewajiban pemberi kerja mencakup pendaftaran seluruh pekerja, pelaporan data kepesertaan dan upah secara benar, serta pembayaran iuran secara rutin dan tepat waktu. Kepatuhan itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

"Melalui tema '~Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa' Satya JKN Awards 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan kesehatan," kata Prihati.

Penghargaan tahun ini diberikan kepada badan usaha dari berbagai kategori, yakni 10 badan usaha milik negara (BUMN), 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil atau mikro. Adapun delapan pemerintah daerah penerima penghargaan terdiri atas empat pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten/kota. Penilaian dilakukan secara berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data dengan melibatkan tim penilai nasional lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menilai JKN memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang sehat sekaligus produktif. Menurut dia, jaminan kesehatan merupakan instrumen perlindungan sosial yang dapat mencegah keluarga jatuh ke dalam kemiskinan akibat beban biaya pengobatan.

"JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal," ujar Cak Imin. Ia juga mengapresiasi perusahaan yang disiplin mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta karena dunia usaha merupakan salah satu penopang perekonomian nasional.

Manfaat sistem gotong royong dalam JKN, lanjut Prihati, terlihat dari pembiayaan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi. Ia mencontohkan, rata-rata biaya satu kali tindakan cuci darah atau hemodialisis mencapai Rp786.200. Jika seorang peserta menjalani tindakan dua kali seminggu atau sekitar delapan kali dalam sebulan, biaya pelayanan tersebut mencapai Rp6.289.600.

"Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah," katanya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa keberlanjutan JKN membutuhkan konsistensi badan usaha sekaligus dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pemda diharapkan memperkuat regulasi, kebijakan perizinan, dan pelayanan publik yang mendorong kepatuhan perusahaan. Ia berharap penerima Satya JKN Awards dapat menjadi teladan bagi badan usaha dan daerah lainnya dalam memperluas perlindungan kesehatan pekerja.

Secara historis, JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program ini menjadi tonggak penting perluasan jaminan kesehatan sosial di Indonesia. Dalam konteks internasional, prinsip perlindungan kesehatan semesta juga sejalan dengan agenda Universal Health Coverage yang didorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 3. Penghargaan Satya JKN diharapkan memperkuat gotong royong sebagai fondasi pembiayaan kesehatan sekaligus mendorong tercapainya perlindungan kesehatan yang lebih merata.(*)

Kemenkes dan IDI Benahi Pembiayaan JKN, Perlindungan Dokter Jadi Prioritas



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Pemerintah bersama organisasi profesi kedokteran memperkuat langkah reformasi sistem kesehatan nasional dengan memprioritaskan pembenahan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerataan tenaga medis, serta perlindungan hukum bagi dokter. Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Penguatan kolaborasi itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IDI sekaligus Hari Dokter Nasional. Kedua pihak menilai peningkatan cakupan jaminan kesehatan harus diimbangi dengan sistem pembiayaan yang memadai, distribusi tenaga medis yang lebih merata, serta jaminan keamanan bagi dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Persoalan pembiayaan menjadi perhatian karena cakupan kepesertaan JKN terus meningkat. Kemenkes mencatat, hingga Agustus 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 99,10 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, peningkatan cakupan tersebut juga diikuti kenaikan beban pelayanan kesehatan hingga 75 persen dibandingkan 2019.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengatakan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan tidak dapat dihadapi pemerintah secara sendiri. Menurut dia, diperlukan keterlibatan organisasi profesi untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab persoalan di lapangan.

"Tantangan kesehatan semakin kompleks, mulai dari pemerataan akses hingga penguatan sistem pembiayaan JKN. Kemenkes tidak dapat berjalan sendiri. IDI adalah mitra strategis pemerintah," ujar Dante.

Sebagai bagian dari pembenahan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan, antara lain penerapan sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penyesuaian regulasi administrasi profesi dokter. Kemenkes juga melakukan penyederhanaan administrasi profesi, pengurangan beban Satuan Kredit Profesi (SKP), serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis.

Dari sisi organisasi profesi, Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, menilai reformasi pembiayaan kesehatan harus diarahkan pada prinsip keadilan dan kecukupan anggaran. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan kepesertaan, tetapi juga kemampuan sistem pembiayaan menopang kebutuhan pelayanan medis.

"Pembiayaan kesehatan masih belum cukup dan perlu ditata agar lebih adil. Perlindungan bagi dokter, baik dari tindak kekerasan maupun kriminalisasi, harus diperkuat agar para dokter dapat mengabdi dengan aman dan berfokus pada keselamatan pasien," tegas Slamet.

Secara historis, Indonesia memulai penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014 melalui BPJS Kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program tersebut menjadi salah satu tonggak penting perluasan perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia sejak 2015 terus mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yakni akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk tanpa mengalami kesulitan keuangan. Agenda tersebut menegaskan bahwa cakupan peserta harus berjalan seiring dengan mutu layanan dan keberlanjutan pembiayaan.

Melalui momentum HUT ke-76 IDI dan Hari Dokter Nasional, Kemenkes dan PB IDI berkomitmen membuka ruang dialog untuk merumuskan rekomendasi kebijakan konkret. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat reformasi pembiayaan JKN, meningkatkan perlindungan profesi dokter, serta memastikan sistem kesehatan nasional mampu memberikan pelayanan yang bermutu, berkeadilan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Polri Pastikan Soliditas Internal Terjaga di Tengah Kasus Penyadapan Presiden



Mabes Polri memastikan soliditas internal tetap terjaga meski tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Prabowo Subianto.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berupaya menjaga soliditas internal di tengah proses hukum yang menjerat tiga perwira tinggi kepolisian dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Institusi tersebut menegaskan, pengungkapan kasus yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian maupun komitmen pembenahan internal.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya membangun institusi kepolisian yang berintegritas serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

"Kami informasikan bahwa soliditas Polri tetap terjaga dalam terwujudnya Polri yang berintegritas, memberikan keadilan dan kepastian hukum," kata Isir kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak cukup dibangun melalui pernyataan kelembagaan. Setiap anggota harus membuktikannya melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, profesional, dan amanah. Karena itu, pembenahan internal menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi institusi di tengah sorotan publik.

"Kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tanggung jawab tugas harus secara amanah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujarnya.

Isir juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan program bersih ke dalam sebagai komitmen memperkuat integritas kepolisian. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai perkara tersebut dan memberikan ruang kepada penyidik untuk menuntaskan proses hukum berdasarkan alat bukti.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Selain ketiga tersangka tersebut, seorang perwira tinggi berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi dalam perkara yang ditangani Bareskrim. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Persoalan penyadapan sendiri bukan isu baru dalam perkembangan hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa penyadapan berkaitan dengan pembatasan hak privasi sehingga kewenangan tersebut harus memiliki dasar undang-undang dan tata cara yang jelas. Putusan itu juga mengingatkan pentingnya pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat negara.

Dalam sejarah internasional, persoalan pengawasan komunikasi juga pernah menjadi bagian penting skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972. Kasus pembobolan dan pemasangan perangkat pengawasan di kantor Partai Demokrat berkembang menjadi penyelidikan besar oleh FBI dan Kongres. Skandal tersebut berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 9 Agustus 1974. Peristiwa itu menjadi salah satu catatan sejarah mengenai pentingnya pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban pejabat publik.

Dengan demikian, penanganan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban individu yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menyangkut prinsip perlindungan privasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga negara. Polri kini menghadapi tuntutan untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan, objektif, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)

Penggeledahan Ponpes Disorot, Kapolri Ganti Kabid Propam Polda Jawa Tengah



Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi jabatan di Polda Jateng, termasuk pergantian Kabid Propam, di tengah kasus penggeledahan pondok pesantren.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jawa Tengah dengan menunjuk Kombes Heri Setyawan menggantikan Kombes Saiful Anwar. Pergantian tersebut berlangsung di tengah munculnya keluhan masyarakat terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penggeledahan pesantren yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB itu melibatkan aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob). Operasi tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Pelaksanaan penggeledahan dilaporkan menimbulkan keresahan di kalangan santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren. Keluhan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah Polri menyatakan akan mendalami berbagai laporan terkait tindakan aparat melalui mekanisme yang berlaku.

Di tengah perkembangan tersebut, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya pergantian pejabat tersebut dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).

Kombes Heri Setyawan yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Rehabilitasi Personel (Kabagrehabpers) Propam Polri kini dipercaya memimpin Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Adapun Kombes Saiful Anwar mendapat penugasan baru sebagai Kepala Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Pengabdian Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.

Rotasi tersebut juga diikuti pergeseran jabatan Kombes Dhani Kristianto. Pejabat yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian itu kini ditugaskan sebagai Wakapolda Sumatera Barat, menggantikan Brigjen Solihin yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menyatakan mutasi merupakan bagian dari pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

"Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," kata Isir.

Meski pergantian Kabid Propam berlangsung berdekatan dengan polemik penggeledahan pesantren, belum ada keterangan resmi yang memastikan mutasi Saiful Anwar merupakan akibat langsung dari tindakan aparat di Ponpes Hamalatul Quran. Polri menyatakan keluhan masyarakat akan didalami secara objektif dan profesional.

Secara historis, pengawasan internal kepolisian Indonesia mengalami perkembangan seiring pembenahan kelembagaan Polri. Fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/54/X/2002 pada 27 Oktober 2002. Lembaga ini memiliki tugas penting dalam pengawasan disiplin, perilaku, dan etika profesi anggota kepolisian.

Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai melibatkan personel polisi dalam misi perdamaian di Kongo pada 1960. Dalam perkembangannya, mandat kepolisian PBB tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, tetapi juga mencakup penguatan institusi, profesionalisme, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat.

Pergantian pejabat Propam Polda Jawa Tengah di tengah sorotan penggeledahan pesantren kembali menempatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat sebagai perhatian publik. Transparansi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta kepastian bahwa setiap tindakan kepolisian sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(*)

Baru Rampung, Talud Rp264 Juta di Lahumoko - Buton Utara Retak dan Pecah, Warga Pertanyakan Kualitas, APH Diminta Bertindak

mi kerusakan. "Saya sudah hubungi penyedianya untuk memperbaiki, pokoknya sesuai standar," ujarnya melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (3/11/2026).

Persoalan kualitas konstruksi infrastruktur publik bukan hal baru dalam tata kelola pembangunan. Di Indonesia, pengaturan mengenai jasa konstruksi telah diperkuat sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk tanggung jawab pelaksana dan pengawasan mutu pekerjaan.

Pada tingkat internasional, evaluasi American Society of Civil Engineers (ASCE) terhadap infrastruktur Amerika Serikat juga menunjukkan pentingnya pemeliharaan dan pengawasan kualitas. Dalam penilaian pertamanya pada 1998, infrastruktur Amerika Serikat memperoleh nilai keseluruhan D, sedangkan pada laporan 2025 meningkat menjadi C. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian fisik proyek.

Karena itu, warga berharap perbaikan talud Lahumoko tidak hanya dilakukan dengan menutup bagian beton yang retak atau pecah, tetapi melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap mutu material, metode pelaksanaan, dan kekuatan konstruksi. Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara juga diharapkan memastikan penyedia jasa memenuhi tanggung jawab sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak, sehingga proyek senilai Rp264.297.000 tersebut benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*)

Kadis Dikpora Baubau La Mane Sebut Kualitas Udara Membaik, Siswa PAUD hingga SMP di Baubau Kembali PTM

rangi risiko paparan polutan. Penggunaan masker atau alat pelindung diri lainnya juga dianjurkan ketika siswa beraktivitas di luar kelas.

Satuan pendidikan diminta meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan peserta didik dan segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat apabila ditemukan siswa yang membutuhkan penanganan medis. Sekolah juga diwajibkan mengikuti perkembangan kualitas udara melalui saluran informasi resmi Pemerintah Kota Baubau maupun instansi berwenang lainnya.

Kewaspadaan tersebut memiliki relevansi dengan pengalaman Indonesia menghadapi krisis kabut asap pada 2015. Bank Dunia mencatat, dampak kebakaran hutan dan lahan saat itu menyebabkan penutupan sekolah hingga 34 hari di sejumlah wilayah. Pada Oktober 2015, sebanyak 24.773 sekolah dengan sekitar 4,69 juta peserta didik terdampak. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran udara bukan hanya persoalan lingkungan dan kesehatan, melainkan juga dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan.

Dampak kabut asap juga melampaui batas negara. Pada krisis asap Asia Tenggara 2015, polusi dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebar hingga Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan sebagian wilayah Thailand dan Filipina. Singapura bahkan menutup seluruh sekolah dasar dan menengahnya pada 25 September 2015 akibat memburuknya kualitas udara. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pengendalian paparan polusi, khususnya terhadap anak-anak, memerlukan perhatian berkelanjutan.

La Mane menegaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau untuk memberikan pendampingan sekaligus edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya dan langkah pencegahan dampak kabut asap. "Dinas Pendidikan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai kewaspadaan dampak kabut asap kepada para peserta didik," jelasnya kepada Baubau Post, Selasa (27/10/2026).(*)

ASR Pacu Sekolah Unggulan di Kendari, Empat Kelas Disiapkan pada 2027

dan SMAN 4, Gubernur menyoroti kondisi sarana prasarana, kebersihan, sanitasi, serta lingkungan belajar di SMAN 6 Kendari.

Di SMAN 6 Kendari, ASR meninjau hasil revitalisasi yang didanai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program tersebut mencakup rehabilitasi enam ruang kelas dan 11 toilet serta pembangunan satu ruang kelas baru. Ia meminta seluruh fasilitas dirawat agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kondisi ruang kelas yang panas, penataan lingkungan, dan sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Sementara itu, pengembangan kelas unggulan di SMAN 1 Kendari saat ini telah berjalan dengan dua kelas dan ditargetkan bertambah menjadi empat kelas pada 2027. ASR menilai peningkatan fasilitas harus berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Kemampuan akademik serta penguasaan bahasa Inggris menjadi aspek penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi seleksi pendidikan unggulan, termasuk Sekolah Garuda.

Target serupa diterapkan di SMAN 4 Kendari. Sekolah tersebut telah memiliki dua kelas unggulan, yakni kelas X A dan X B, dengan masing-masing 25 siswa. Pemerintah provinsi merencanakan dukungan berupa pendingin ruangan, komputer, bangku, dan loker. Tenaga pengajar untuk kelas unggulan juga akan melalui proses seleksi berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. "Sekolah unggulan tidak cukup hanya dengan fasilitas. Kompetensi guru dan kualitas pembelajaran juga harus ditingkatkan," demikian penekanan ASR dalam agenda pengembangan pendidikan tersebut.

Selain pembenahan fasilitas, Gubernur mendorong perluasan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi putra-putri Sultra, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Saat berdialog dengan siswa kelas XII SMAN 1 Kendari dan siswa kelas X SMAN 4 Kendari, ia meminta para pelajar berani menetapkan cita-cita serta mempersiapkan kemampuan akademik dan bahasa asing sejak dini. "Kalau ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, kuasai bahasa Inggris dan pahami budaya negara tujuan," pesannya. Para penerima beasiswa diharapkan kembali ke daerah untuk mengabdikan pengetahuan dan pengalaman bagi pembangunan Sultra.

Dalam kunjungan tersebut, ASR juga mengevaluasi empat indikator lingkungan sekolah, yakni kebersihan, kerapian, keindahan, dan kesehatan. Di SMAN 1 Kendari, ia mengapresiasi perbaikan kebersihan, tetapi meminta area parkir dan halaman ditata lebih baik. Di SMAN 6 Kendari, ia mengingatkan pihak sekolah agar memperhatikan interaksi antarsiswa dan mencegah perundungan. Perhatian terhadap kesejahteraan siswa juga terlihat ketika Gubernur memberikan sejumlah uang kepada seorang pelajar yang diketahui mengenakan sepatu rusak. Menurutnya, lingkungan pendidikan harus aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

Pengembangan sekolah unggulan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia Sultra. Secara historis, Indonesia telah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai agenda pembangunan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, UNESCO melalui laporan Global Education Monitoring Report secara konsisten menekankan pentingnya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, ASR menegaskan bahwa pembangunan sekolah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus menghasilkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.(*)

SMPN 1 Lapandewa Perkuat Kompetensi Guru Cegah Perundungan dan Kekerasan

Kepala SMP Negeri 1 Lapandewa, La Jundi, S.Pd., M.M., mengatakan sekolah harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik. Menurut dia, tidak boleh ada siswa yang mengalami intimidasi, diskriminasi, maupun tindakan yang merendahkan martabatnya selama menjalani proses pendidikan.

"Sekolah tidak boleh memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan. Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi siswa, tempat yang aman, nyaman, dan inklusif untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya," tegas La Jundi.

Workshop tersebut menghadirkan dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Dino Rizadman Rahia, M.Psi., Psikolog. Dalam materinya, ia menjelaskan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan hubungan antarsiswa, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak psikologis, mengganggu kepercayaan diri, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga keberlangsungan proses pembelajaran.

"Guru tidak hanya dituntut mampu mengenali berbagai bentuk perundungan dan kekerasan, tetapi juga harus memahami dampak psikologis yang dialami siswa," jelas Dino.

Ia menekankan, tenaga pendidik harus mampu mengenali indikasi kekerasan sejak dini, merespons setiap laporan secara tepat, serta memberikan pendampingan awal kepada korban. Penanganan kasus juga harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak.

Selain memperkuat mekanisme penanganan, pencegahan perlu dilakukan melalui komunikasi positif, penanaman empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan pembiasaan perilaku saling menghormati. Melalui pendekatan tersebut, sekolah diharapkan mampu membangun budaya pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi perundungan maupun segala bentuk kekerasan.

Komitmen SMPN 1 Lapandewa tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Secara internasional, perhatian terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Konvensi Hak Anak PBB yang diadopsi pada 20 November 1989 dan agenda SDGs yang disepakati pada 2015, khususnya tujuan keempat tentang Pendidikan Berkualitas, tujuan kelima tentang Kesetaraan Gender, serta tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

La Jundi berharap, keterlibatan akademisi UNM melalui workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat tanggung jawab seluruh warga sekolah dalam melindungi peserta didik. Ia menegaskan bahwa sekolah ramah anak bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menjamin setiap siswa memperoleh pendidikan, perlindungan, rasa aman, dan kesempatan berkembang secara optimal.(*)

Porprov 2026 di Kendari, PGSI Baubau Siapkan 18 Atlet Gulat Andalan Daerah

bau di tingkat provinsi.

Ketua PGSI Kota Baubau, Kompol Anwar, S.H., M.H., mengatakan seleksi atlet telah dilaksanakan pada awal Oktober 2026. Atlet yang dipersiapkan berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, mulai dari pelajar SMP, SMA, mahasiswa, hingga masyarakat yang telah bekerja di sektor swasta. Komposisi tersebut diharapkan menjadi kombinasi antara regenerasi dan kesiapan kompetitif tim.

"Rata-rata usia atlet yang kami persiapkan masih tergolong muda. Ada satu atlet yang masih duduk di bangku SMP, kemudian pelajar SMA, mahasiswa, serta ada juga yang sudah bekerja di sektor swasta," kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Kepercayaan diri PGSI Baubau bertumpu pada catatan prestasi dalam dua penyelenggaraan Porprov sebelumnya. Saat berlaga di Kabupaten Konawe Selatan, pegulat Baubau berhasil meraih satu medali emas, empat perak, dan tiga perunggu. Adapun pada Porprov yang berlangsung di Kabupaten Buton dan Kota Baubau, cabang olahraga gulat mengoleksi dua medali perak dan tiga perunggu. Rekam jejak tersebut menjadi modal untuk kembali bersaing di Kendari.

Secara historis, olahraga gulat telah lama menjadi bagian dari kompetisi olahraga prestasi nasional maupun internasional. Indonesia juga memiliki tradisi keikutsertaan dalam cabang gulat pada ajang multievent, termasuk SEA Games dan Asian Games. Dalam perkembangannya, pembinaan atlet usia muda, kompetisi berjenjang, serta pemusatan latihan menjadi bagian penting dalam membangun prestasi. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa regenerasi dan kesinambungan pembinaan merupakan kebutuhan penting bagi daerah yang ingin menjaga daya saing atletnya.

Namun, persiapan menuju Porprov 2026 belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Anwar mengakui keterbatasan sarana dan prasarana latihan serta kebutuhan tambahan anggaran pembinaan masih menjadi persoalan. Meski KONI Kota Baubau telah memberikan dana pembinaan, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan persiapan atlet.

PGSI Baubau karena itu berharap adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan training camp (TC) atau pemusatan latihan, sekaligus pemenuhan fasilitas latihan. Menurut Anwar, waktu persiapan yang semakin terbatas membuat pemusatan latihan diperlukan agar para atlet dapat lebih fokus meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan kesiapan bertanding. "Kami berharap dalam waktu dekat ada dukungan dana untuk TC atlet agar mereka bisa lebih fokus berlatih. Apalagi pelaksanaan Porprov sudah di depan mata, yakni Desember 2026," ujarnya.

Di tengah kebutuhan tersebut, Anwar mengapresiasi KONI Kota Baubau yang telah turun langsung mengunjungi PGSI untuk melihat dan memantau pelaksanaan seleksi atlet. Pemantauan itu diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara induk organisasi olahraga dan cabang olahraga. Dengan persiapan yang lebih optimal, PGSI Baubau berharap 18 pegulat yang disiapkan mampu tampil maksimal dan meningkatkan perolehan medali bagi Kota Baubau pada Porprov Sultra 2026 di Kendari.(*)

Jumat, 06 November 2026 BAUB AU POST www.baubaupost.com

PKK Baubau Perkuat Kepemimpinan Perempuan Lewat Akademi Paradigta, Sitti Aryati Yusran Ajak Perempuan Baubau Jadi Penggerak Perubahan Sosial



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Peningkatan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik menjadi salah satu agenda pemberdayaan yang didorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Baubau. Melalui Akademi Paradigta, perempuan didorong tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga mengambil bagian dalam pembangunan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dengan menggandeng Akademi Paradigta Indonesia PEGAS PEKKA.

Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj. Sitti Aryati Yusran, mengatakan pemberdayaan perempuan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan agar perempuan memiliki keberanian, kemampuan, dan kesempatan untuk menentukan kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut dia, perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai persoalan pembangunan. Tekanan ekonomi, kemiskinan, dan terbatasnya akses pemberdayaan dapat berdampak terhadap ketahanan keluarga, termasuk persoalan pemenuhan gizi dan penanganan stunting.

Dalam konteks pembangunan daerah, Sitti Aryati menilai PKK memiliki peran penting untuk menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh kader PKK dari tingkat kelurahan hingga kota, organisasi perangkat daerah (OPD), serta lembaga perempuan memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor.

"Perempuan harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri agar mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Semangat inilah yang menjadi titik temu antara PKK, pemerintah daerah, dan PEGAS PEKKA," katanya.

Ia juga mengapresiasi PEGAS PEKKA yang memilih Baubau sebagai wilayah intervensi program. Melalui pendidikan terstruktur Akademi Paradigta, peserta diharapkan memperoleh bekal kepemimpinan akar rumput, kemampuan advokasi, serta keberanian menyampaikan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Penguatan peran perempuan tersebut memiliki landasan historis panjang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 1979 mengadopsi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), sebagai instrumen internasional untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Tonggak berikutnya terjadi pada 1995 melalui Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing, China. Sebanyak 189 negara mengadopsi Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing yang menetapkan 12 bidang prioritas pemberdayaan perempuan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Di Indonesia, upaya memperluas keterwakilan perempuan dalam politik memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mengatur kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD.

Dengan latar belakang tersebut, peluncuran Akademi Paradigta di Baubau diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pendidikan formal. Program ini diharapkan menjadi ruang pembentukan kepemimpinan perempuan yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. (*)

Jelang Hari Pahlawan, Baubau Siapkan Ziarah Nasional, Tabur Bunga 2026, dan Ajak Warga Kibarkan Merah Putih, serta Hening Cipta Serentak 2026



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mematangkan persiapan peringatan Hari Pahlawan 2026 dengan menyiapkan tiga agenda utama, yakni upacara bendera, ziarah nasional, dan tabur bunga di laut. Seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026) tersebut akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, organisasi kepemudaan, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Baubau, La Ode Aswad, S.Sos., M.Si., di ruang rapat lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut digelar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk memastikan seluruh agenda berjalan tertib, aman, dan khidmat.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga momentum memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan pengabdian para pahlawan kepada bangsa.

La Ode Aswad menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur kepanitiaan. Menurut dia, kesiapan setiap seksi harus terkoordinasi agar tidak terjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan, mulai dari upacara, perlengkapan, pelayanan kesehatan, pengamanan, hingga publikasi.

"Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum penghormatan nyata atas jasa para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh seksi kepanitiaan harus bekerja terintegrasi dan disiplin terhadap rundown yang telah dirancang," tegasnya.

Secara historis, Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November berakar pada pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran tersebut menjadi salah satu simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya kembalinya kekuasaan kolonial setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemerintah kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

Semangat mengenang perjuangan juga menjadi tradisi di berbagai negara. Salah satunya Remembrance Day yang diperingati setiap 11 November di sejumlah negara Persemakmuran untuk mengenang korban perang, terutama berakhirnya Perang Dunia I melalui gencatan senjata pada 11 November 1918. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap pengorbanan para pejuang dan korban perang merupakan nilai kemanusiaan yang melampaui batas negara.

Dalam rangkaian kegiatan di Baubau, upacara bendera direncanakan dipimpin langsung Wali Kota Baubau selaku inspektur upacara. Agenda tersebut mencakup pembacaan pesan-pesan pahlawan, penyampaian pidato seragam dari Kementerian Sosial RI, serta penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada para veteran.

Selain itu, upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Oputa Yi Koo dijadwalkan dipimpin Dandim 1413/Buton. Sementara itu, upacara tabur bunga di laut yang berlokasi di Pelabuhan Murhum akan dipimpin Kapolres Baubau. Kedua kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan Indonesia.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, La Ode Aswad meminta Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian memperkuat koordinasi pengamanan, termasuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas serta memastikan seluruh lokasi kegiatan tetap kondusif.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Baubau untuk mengibarkan bendera Merah Putih satu tiang penuh pada 10 November 2026. Mari kita bersama-sama mengambil sikap hening cipta selama 60 detik tepat pukul 08.15 WITA," ujarnya.

Pelaksanaan hening cipta serentak tersebut akan ditandai dengan bunyi sirene kendaraan di jalan raya, termasuk sirene armada pemadam kebakaran dan ambulans. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama jajaran pemerintah di tingkat wilayah diharapkan turut menyosialisasikan imbauan tersebut agar partisipasi masyarakat semakin luas.

Melalui keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Pemkot Baubau berharap peringatan Hari Pahlawan 2026 tidak hanya berlangsung tertib dan khidmat, tetapi juga memperkuat kesadaran generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan melalui pengabdian, persatuan, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.(*)